

PERAN FAKTOR-FAKTOR KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Suryo Pratolo & Binang Sukma Yudha

E-Mail suryo@umy.ac.id

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

The objective of the study is to empirically examine the role of financial factors and economic growth to acceptance of regional own revenue. The samples of study are direct revenue, economic growth, and acceptance of regional own revenue in 2007–2009 at 391 municipalities. The empirical results show that the employee expenditure has negative and significant direct effect to economic growth. While good and service expenditure has positive and significant direct effect to economic growth. Capital expenditure has positive and not significant direct effect to economic growth. While the employee expenditure has positive and significant indirect effect to acceptance of regional own revenue by means of economic growth. Good and service expenditure has positive and significant indirect effect to acceptance of regional own revenue by means of economic growth. Capital expenditure has positive and not significant indirect effect to acceptance of regional own revenue by means of economic growth. While the direct effect of economic growth to acceptance of regional own revenue is positive and not significant.

Keywords: *Direct Expenditure, Economic Growth, Acceptance of Regional Own Revenue, Municipal.*

PENDAHULUAN

Data menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi hanya sebesar 20 persen (Kuncoro, 2007). Apakah pemerintah daerah harus terus menggantungkan pendapatan daerah mereka kepada pemerintah pusat, di saat inilah kemandirian daerah itu dituntut untuk diwujudkan agar pemerintah daerah tidak ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Semangat otonomi ternyata telah membuat daerah-daerah otonom memiliki obsesi yang sangat tinggi untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Semangat

tersebut berlanjut pada penerbitan berbagai Peraturan Daerah yang sejak semula memang dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun dengan terbitnya Peraturan Daerah tersebut, bukannya peningkatan PAD yang diperoleh, melainkan sepiunya minat investor untuk datang ke daerah.

Dengan pemaksimalan belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa diharapkan dapat meningkatkan PAD pada suatu pemda, dengan PAD yang tinggi otomatis segala kebutuhan pemda itu akan tercukupi dan hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dan daerah juga dituntut untuk

mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (Adi, 2007).

Belanja modal dilakukan untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan disuatu pemda. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (David dan Adi, 2007). Secara logika jika sarana dan prasarana terbentuk dengan baik dan maksimal otomatis akan menarik investor untuk berinvestasi dan membuka usaha baru. Dengan bertambahnya usaha baru maka akan jelas berdampak pada pendapatan asli daerah itu sendiri.

Belanja barang dan jasa tentunya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Ketika belanja barang dan jasa dipenuhi, para pegawai Pemda dapat dengan cepat melakukan tindakan pelayanan publik. Dengan cepatnya pelayanan publik maka diharapkan dapat meningkatkan PAD. Belanja pegawai dilakukan sebagai upaya memaksimalkan kinerja tiap pegawai di suatu Pemda. Logikanya ketika dengan banyaknya jumlah pegawai di lingkungan birokrasi pemda, beban kerja setiap individu akan menjadi lebih ringan, beban yang semakin ringan ini seharusnya berkorelasi terhadap pelayanan pada masyarakat dalam waktu yang semakin cepat.

Hal tersebut di atas berhubungan dengan birokrasi dalam melakukan bisnis dan pekerjaan bagi masyarakat, dengan cepatnya pelayanan kepada publik ini makajalannya bisnis dalam kalangan masyarakat juga akan semakin lancar. Dengan lancarnya kegiatan usaha masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah tersebut, dikarenakan lancarnya kegiatan usaha masyarakat.

Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Biaya pembangunan perlu dialokasikan dengan baik karena penelitian yang dilakukan Wong (2004) dalam Setiaji dan Adi (2007) menunjukkan bahwa pembangunan infras-truktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah yang tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasa tidak akan memberikan arti. Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua kom-ponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan serta Bantuan. Penelitian Brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu agresif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya.

Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi. Adi (2007) menyatakan pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan fasilitas ini akan meningkatkan

pendapatan asli daerah dan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Penelitian tentang belanja daerah berpengaruh terhadap PAD juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti penelitian Adi (2007) yang menunjukkan adanya pengaruh positif belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap PAD pemerintah se-Jawa Bali, demikian juga yang dilakukan oleh Putra (2010), yang menyimpulkan hasil yang sama yaitu adanya pengaruh positif belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap PAD, namun disini belanja modal berpengaruh negatif terhadap PAD, pada Pemda dengan kemampuan tinggi, sedang, rendah se-Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian Suryawan (2007) yang menyatakan adanya hubungan positif signifikan ketiga belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal terhadap PAD se-Jawa Bali.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adi (2007) tentang pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal terhadap penerimaan PAD, tinjauan pada pemda dengan kemampuan keuangan rendah se-Jawa Bali. Dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel eksogen pertumbuhan ekonomi, dikarenakan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah, baik pusat maupun daerah. Peningkatan PAD yang tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasa tidak akan memberikan arti positif terhadap peningkatan PAD dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang baik disuatu daerah akan mempengaruhi peningkatan PAD di daerah tersebut.

Variabel belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dalam

penelitian ini menggunakan lag 2 tahun atau $t-2$, sedangkan untuk variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan lag 1 tahun atau $t-1$. Dikarenakan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal tahun 2007 digunakan untuk memprediksi PAD tahun 2009. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 digunakan untuk memprediksi PAD tahun 2009. Jika peneliti menggunakan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 maka peneliti tidak dapat memprediksi PAD tahun 2009.

Penulis juga menambahkan statistik deskriptif untuk menggambarkan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Disamping itu analisis deskriptif dalam penelitian ini juga ditujukan untuk membandingkan antara factor-faktor keuangan yang berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah ke dalam zona waktu Indonesia. Peneliti juga memperluas ruang lingkup studi empiris dengan meneliti pemda se-Indonesia. Perbedaan kontur geografis antara wilayah Indonesia Timur, Tengah dan Indonesia Barat tentunya akan memunculkan kebijakan masing-masing daerah. Dengan uraian diatas maka peneliti akan melakukan Penelitian dengan judul.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Belanja (Pegawai, Barang dan Jasa dan Modal) dan Pertumbuhan Ekonomi

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi

disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (*charge*), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (*cost and benefit*), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru merespon negatif (Mardiasmo, 2002).

Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat *retribusi* lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo 2002). Dari 803 perda penerimaan daerah, 90,3 % merupakan retribusi (Lewis, 2003). Namun, banyaknya perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah.

Belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah khususnya belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan ketiga belanja tersebut mempu-

nyai peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di pemerintahan daerah yaitu dalam peningkatan kinerja pegawai pemerintah di daerah dengan kinerja yang baik dari pegawai pemerintah daerah dan belanja barang dan jasa yang diperuntukkan untuk pembangunan infra-struktur public seperti jalan raya, dan fasilitas publik lainnya yang secara khusus diperuntukkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat hal ini akan berdampak pada pendapatan asli daerah menjadi naik sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan menjadi tinggi juga.

Belanja modal juga dilakukan untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan disuatu pemda. Infra-struktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (David dan Priyo, 2007). Secara logika jika sarana dan prasarana terbentuk dengan baik dan maksimal otomatis akan menarik investor untuk berinvestasi dan membuka usaha baru. Dengan bertambahnya usaha baru maka akan jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dan pendapatan asli daerah tersebut akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan perkapita.

Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor

industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pem-bangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997). Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik hipotesis:

H₁: Terdapat pengaruh positif Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi SeIndonesia.

H₂: Terdapat pengaruh positif Belanja Barang dan Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se-Indonesia.

H₃: Terdapat pengaruh positif Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi SeIndonesia.

Belanja (Pegawai, Barang dan Jasa dan Modal) dan Pendapatan Asli Daerah

Dengan pemaksimalan belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa diharapkan dapat meningkatkan PAD pada suatu pemda, dengan PAD yang tinggi otomatis segala kebutuhan pemda itu akan tercukupi dan hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dan daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (Priyo Hari Adi 2007).

Belanja barang dan jasa tentunya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Ketika belanja

barang dan jasa dipenuhi, para pegawai pemda dapat dengan cepat melukan tindakan untuk melakukan pelayanan publik. Dengan lancarnya pelyanan publik maka diharapkan dapat menaikan PAD.

Belanja pegawai dilakukan sebagai upaya maksimalan kinerja tiap pegawai di suatu pemda. Logikanya ketika dengan banyaknya jumlah pegawai di lingkungan birokrasi pemda, beban kerja setiap individu akan menjadi lebih ringan, beban yang semakin ringan ini seharusnya berkorelasi terhadap pelayanan pada masyarakat dalam waktu yang semakin cepat. Penyelesaian tugas kepada masyarakat ini diharapkan akan mening-katkan pertumbuhan ekonomi.

Belanja-belanja yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan penda-patan asli suatu daerah. Semakin tinggi keperluan terhadap belanja pegawai maka pemerintah harus berusaha untuk untuk meningkatka PAD agar dapat memenuhi kebutuhan akan belanja pegawai, barang dan jasa, karena pembiayaan atas belanja ini diusahakan dari PAD. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik hipotesis:

H₄: Terdapat pengaruh positif Belanja Modal terhadap PAD Se-Indonesia.

H₅: Terdapat pengaruh positif Belanja Pegawai terhadap PAD Se-Indonesia.

H₆: Terdapat pengaruh positif Belanja Barang dan Jasa terhadap PAD Se-Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Ketergantungan pada transfer

dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi. Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini :

- 1) Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.
- 2) Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003). Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari 6,59 % pada tahun 2001 menjadi 7,33 % pada tahun 2002 (Badan Pusat Statistik, 2004), dengan sumber utama penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14 %.

Lewis (2003) menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemda, yaitu sebesar 56 % untuk pemerintah propinsi dan 103 % untuk pemerintah kabupaten dan kota. Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi pada masing-masing pemda sebesar 76 % dan 46 %. Gambaran ini menunjukkan belum optimalnya pemda (khususnya kabupaten dan kota) dalam menggali potensi lokal yang dimiliki.

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksis dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan

ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.

Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan eksis/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor imdustri ini (Kadjatmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002). Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima.

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) pada pemerintah propinsi menunjukkan ada 12 propinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Sedangkan propinsi yang lain perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PDRB lebih banyak keluar dari daerah tersebut.

Dalam era desentralisasi fiskal hal semacam ini wajar terjadi, mengingat adanya kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai contoh adalah dibukanya peluang berinvestasi dengan berbagai kemudahan. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong

pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Lin dan Liu, 2000; Saragih, 2003; Bappenas, 2003).

H7: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap PAD Se-Indonesia.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

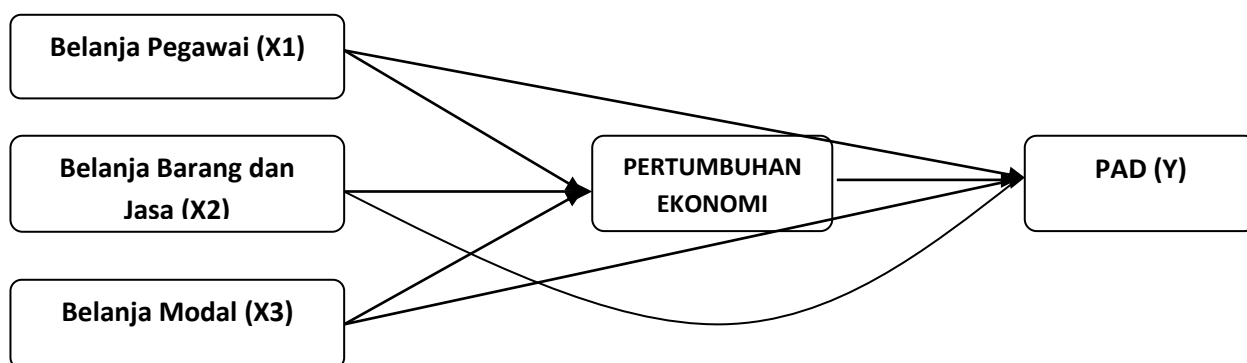
Objek penelitian ini adalah data realisasi APBD tahun 2007-2009, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun 2007, laju pertumbuhan PDRB tahun 2008, dan pendapatan asli daerah tahun 2009 pada kabupaten dan kota se Indonesia.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian diperoleh dan dikumpulkan dari hasil yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa laporan realisasi APBD kabupaten dan kota se Indonesia tahun 2007 dan 2009 dan PDRB tahun 2008. Laporan realisasi APBD kabupaten se Indonesia tahun 2007-2009 digunakan untuk melihat nilai belanja modal. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa Serta pendapatan asli daerah.



Gambar 1. Model Penelitian

Definisi operasional variabel

Belanja Pegawai

Belanja pegawai diukur dari total penjumlahan belanja pegawai/personalia pada kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Data ini diperoleh dari laporan keuangan pemda untuk tahun pelaporan tahun 2007.

Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa diukur dari total penjumlahan belanja barang dan jasa pada kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Data ini diperoleh

dari Laporan Keuangan pemda untuk tahun pelaporan tahun 2007.

Belanja Modal

Belanja modal diukur dari total penjumlahan belanja modal pada kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Data ini diperoleh dari Laporan Keuangan pemda untuk tahun pelaporan tahun 2007.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan rumus pertumbuhan ekonomi

sedangkan kemandirian daerah diukur dengan rasio kemandirian. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, diambil data PDRB maupun data pendapatan per kapita tiap-tiap daerah pada tahun yang dianalisis. Sedangkan untuk kemandirian daerah digunakan data realisasi APBD.

Adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) maupun pendapatan per kapita dihitung dengan formulasi berikut ini (Kuncoro, 2004 dalam Adi, 2007):

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan ekonomi} \\ & = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan :

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t

Pendapatan Asli Daerah

PAD diukur dari total penjumlahan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Data ini diperoleh dari Laporan Keuangan pemda untuk tahun pelaporan tahun 2008.

Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis ini menggunakan alat-alat seperti rata-rata, nilai maksimum, minimum dan standar deviasi. Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang faktor keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan PAD dengan membandingkan dari masing masing daerah pembagian waktu di Indonesia.

Analisis Structural Equation Model (SEM)

Analisis ini digunakan untuk menguji Hipotesis 1-7. Dengan alat ini dimung-

kinkan pengujian pengaruh simultan sebuah variabel terhadap variabel-variabel lain. Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan analisis struktural ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini juga ditujukan untuk membandingkan antara faktor-faktor keuangan yang berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pendapatan asli daerah yang dibandingkan ke dalam tiga zona waktu Indonesia, yaitu Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Berikut disajikan hasil deskriptif pada tabel 1.

Analisis Structural Equation Models (SEM)

Berdasarkan kajian teori, maka dapat dibuat diagram alur hubungan kausalitas antar konstruk beserta indikatornya. Hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.

Persamaan Struktural dan Measurement Model

Persamaan struktural dari model diagram alur pada gambar 2. dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$PAD = \beta_1 PE + Z_1$$

$$PE = \beta_1 BP + \beta_2 BBJ + \beta_3 BM + Z_2$$

$$PAD = \beta_1 BP + \beta_2 BBJ + \beta_3 BM + Z_3$$

Keterangan:

PAD: Pendapatan Asli Daerah

PE : Pertumbuhan Ekonomi

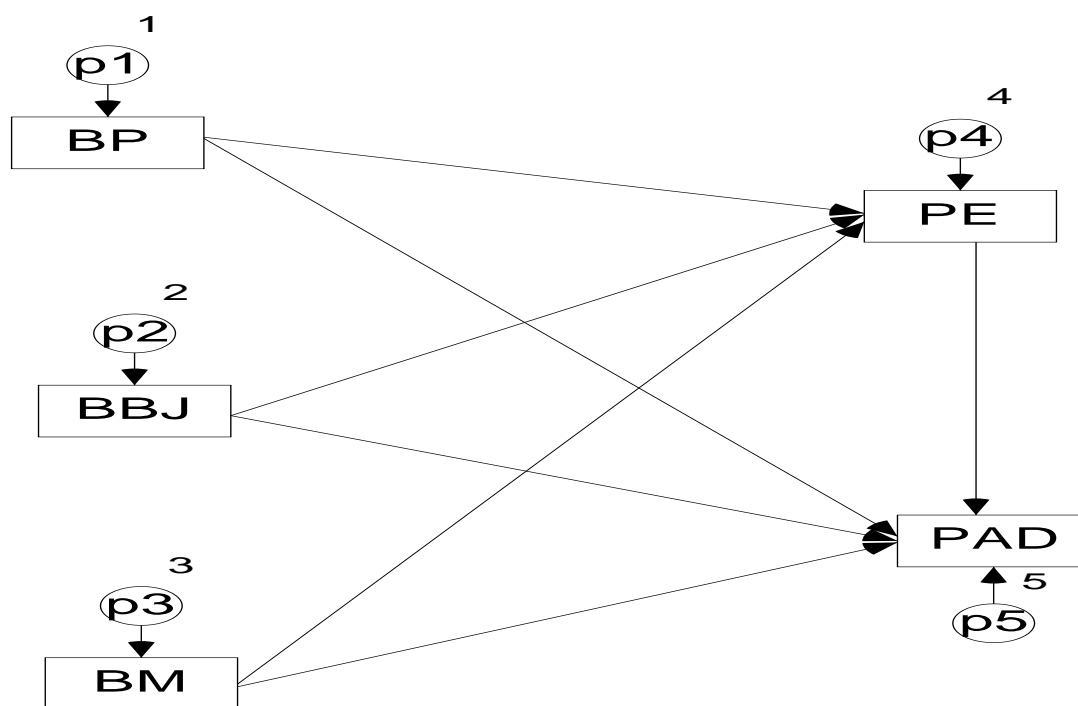
BP: Belanja Pegawai

BBJ: Belanja Barang dan Jasa

BM: Belanja Modal

Tabel 1
Deskriptif Statistik Data Penelitian

Varia- bel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Daerah Bagian Barat					
BP	229	60.000.000.000	1.000.000.000.000	300.000.000.000	155.600.000.000
BBJ	229	20.000.000.000	500.000.000.000	100.000.000.000	65.100.000.000
BM	229	40.000.000.000	1.000.000.000.000	200.000.000.000	125.600.000.000
PE	229	-7,71	14,74	5,4019	1,79136
PAD	229	4.555	864.083	57.474,57	80.629,97091
Daerah Bagian Tengah					
BP	115	40.000.000.000	600.000.000.000	200.000.000.000	85.610.000.000
BBJ	115	30.000.000.000	700.000.000.000	80.000.000.000	67.320.000.000
BM	115	30.000.000.000	2.000.000.000.000	200.000.000.000	177.700.000.000
PE	115	-9,78	14,44	6,0645	2,53298
PAD	115	6.992	667,559	35.423,25	64435,74175
Daerah Bagian Timur					
BP	47	50.000.000.000	300.000.000.000	100.000.000.000	52.140.000.000
BBJ	47	40.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	40.210.000.000
BM	47	90.000.000.000	400.000.000.000	200.000.000.000	74.800.000.000
PE	47	4,16	16,9	7,4098	2,49470
PAD	47	3.500	94.135	17.553,55	17556,82382



Gambar 2. Hasil Rangkaian Alur *Structural Equation Model*

Tabel 2
Assessment of Normality

Vari able	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
BM	32975538102.000	1670458200480.640	5.455	44.037	44.514	179.670
BBJ	23587458400.000	678127250681.210	3.712	29.966	23.463	94.703
BP	43226924239.000	1011482302493.400	1.589	12.825	3.714	14.991
PE	-9.780	16.900	-808	-6.520	12.977	52.378
PA D	3500.000	864083.000	6.457	52.126	57.018	230.140
Mult ivari ate					190.54 0	225.162

Sedangkan spesifikasi dari model pengukuran, persamaannya dapat disusun sebagai berikut:

- Konstruk Eksogen Belanja pegawai

$$X1 = \lambda1BP + e1$$

- Konstruk Eksogen belanja barang dan jasa

$$X2 = \lambda2BBJ + e2$$

- Konstruk Eksogen belanja modal

$$X3 = \lambda3BM + e3$$

- Konstruk Endogen Pertumbuhan Ekonomi

$$Y1 = \gamma1PE + e4$$

- Konstruk Endogen Penerimaan pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 2, ternyata nilai *critical ratio skewness value* dari semua indikator berada di atas $\pm 2,58$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari semua indikator berdistribusi tidak normal sehingga perlu dilakukan tranformasi dengan menggunakan log natural (Ln). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan data yang telah dihitung melalui tranformasi dengan menggunakan

$$Y2 = \gamma2PAD + e5$$

Evaluasi Kriteria *Goodness of Fit*

Evaluasi kriteria *goodness of fit* terhadap model yang dihasilkan secara lengkap dapat dilakukan sebagai berikut:

Evaluasi Normalitas Data

Evaluasi normalitas data dilakukan dengan menggunakan kriteria *critical ratio skewness value* sebesar $\pm 2,58$ pada tingkat signifikansi 0,01 (1%). Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai *critical ratio skewness value* di bawah harga mutlak 2,58 (Ferdinand, 2000:134; Ghozali, 2004:105). log-natural maka ditemukan hasil sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai *critical ratio skewness value* dari semua indikator berada pada rentang $\pm 2,58$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari semua indikator berdistribusi normal, dan layak digunakan untuk penelitian. Selanjutnya data yang digunakan adalah data yang berasal dari tranformasi dengan menggunakan Log natural.

Tabel 3
Assessment of Normality Dengan Menggunakan Tranformasi Ln

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
LnBM	24.219	28.144	.095	.679	.045	.347
LnBBJ	23.884	27.243	.063	.578	.089	.628
LnBP	24.490	27.642	.058	.467	-.408	-1.638
LnPE	.351	2.827	-.040	-.317	.073	.520
LnPAD	8.161	13.669	.054	.401	.544	2.180
Multivariate					.497	1.984

Evaluasi Outlier

Deteksi outlier dilakukan untuk melihat *univariate outlier* maupun *multivariate outlier*. *Univariate outlier* dideteksi dengan menggunakan dasar nilai *z-score*. Jika nilai *z-score* $\geq 3,0$ maka data observasi tersebut ada yang *outlier* (Ferdinand, 2000:134). Hasil perhitungan *z-score* dapat ditunjukkan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Nilai Z-Score

	N	Minimum	Maximum
ZscoreLnBM	386	.70979	.72814
ZscoreLnBBJ	386	.68006	.64851
ZscoreLnBP	386	.73384	.68377
ZscoreLnPE	386	-1.40839	-1.50930
ZscoreLnPAD	386	-.71529	-.55112
Valid N (listwise)	386		

Sedangkan untuk mendeteksi *multivariate outlier* dilakukan dengan melihat nilai *mahalanobis distance*. Nilai *mahalanobis distance* dibandingkan dengan nilai *chi-square* pada tingkat signifikansi 0,001. Apabila terdapat nilai *mahalanobis distance* yang lebih besar dari nilai *chi-square*, berarti terjadi masalah *multivariate outlier* (Ferdinand, 2000; Ghozali, 2004). Berdasarkan ketentuan tersebut, pada penelitian ini nilai *chi-square* dengan tingkat signifikansi 0,001 dan *degree of*

freedom 3 atau χ^2 (3,0.001) diperoleh nilai sebesar 20,286.

Tabel 5
Nilai Mahalanobis Distance

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
287	17.780	.003	.000
370	17.656	.003	.000
337	17.522	.004	.000
55	16.872	.005	.000

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5, hasil perhitungan *mahalanobis distance* penelitian ini paling besar adalah 17,780, dan nilai tersebut lebih kecil dari nilai *chi-square* 20,286. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat permasalahan *multivariate outlier*. Hal ini berarti data tersebut layak untuk digunakan.

Evaluasi Multicollinearity dan Singularity

Permasalahan *multicollinearity* dan *singularity* dapat dideteksi melalui nilai determinan matriks kovarian. Semakin besar nilai matriks kovarian, berarti data semakin baik. Dalam penelitian ini, nilai determinan matriks kovarian sebesar 0,056. Meskipun nilai tersebut mendekati angka nol, namun masih lebih besar dari nol sehingga data tetap layak untuk digunakan.

Tabel 6
Hasil Perhitungan *Goodness of Fit*

Kriteria	Hasil Model	Nilai Kritis	Kesimpulan
X ² -Chi-square	3.898	Kecil	Baik
Probability	0,269	≥ 0,05	Baik
RMSEA	0,025	≤ 0,08	Baik
GFI	1.063	≥ 0,90	Baik
AGFI	0,915	≥ 0,90	Baik
CMIN/DF	1.299	≤ 2,00	Baik
TLI	0,973	≥ 0,95	Baik
CFI	0,989	≥ 0,95	Baik

Tabel 7
Estimasi Parameter

			Estimate	S.E.	C.R.	P
LnBP	<---	p1	0,570	0,021	27,749	0,000
LnBBJ	<---	p2	0,350	0,013	27,749	0,000
LnBM	<---	p3	0,294	0,011	27,749	0,000
LnPE	<---	LnBP	-0,150	0,025	-6,000	0,000
LnPE	<---	LnBBJ	0,153	0,029	5,304	0,000
LnPE	<---	LnBM	0,009	0,028	0,323	0,746
LnPE	<---	p4	0,140	0,005	27,749	0,000
LnPAD	<---	LnBBJ	0,270	0,064	4,240	0,000
LnPAD	<---	LnBP	1,025	0,056	18,374	0,000
LnPAD	<---	LnBM	0,040	0,060	0,674	0,500
LnPAD	<---	p5	0,267	0,010	27,749	0,000
LnPAD	<---	LnPE	0,021	0,109	0,189	0,850

Evaluasi Indeks Kriteria *Goodness of Fit*

Hasil perhitungan model SEM menghasilkan indeks *goodness of fit* sebagaimana ditunjukkan tabel 6. Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa semua kriteria pengujian menunjukkan hasil yang baik. Pengujian model yang dilakukan menghasilkan konfirmasi yang baik atas dimensi-dimensi faktor dan hubungan kausalitas antar faktor. Dengan demikian maka model tersebut dapat diterima.

Evaluasi *Regression Weight* untuk Uji Kausalitas

Hasil perhitungan estimasi nilai parameter sebagaimana ditunjukkan pada tabel 7. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai *critical ratio* (CR) yang identik dengan uji-t dalam regresi, tidak ada yang sama dengan nol. Hal itu berarti bahwa hipotesis nol yang menyatakan koefisien regresi antar hubungan kausalitas adalah sama dengan nol dapat ditolak. Dengan demikian maka hubungan kausalitas yang disajikan dalam model dapat diterima.

Analisis Direct Effect, Indirect Effect, dan Total Effect

Analisis ini digunakan untuk melihat kekuatan pengaruh antar konstruk, baik pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, maupun pengaruh totalnya. Pengaruh langsung dari model penelitian ini sebagaimana disajikan pada tabel 8.

Tabel 8
Standardized direct effects – Estimates

	LnBM	LnBBJ	LnBP	LnPE
LnBM	.000	.000	.000	.000
LnBBJ	.000	.000	.000	.000
LnBP	.000	.000	.000	.000
LnPE	.015	.250	-.283	.000
LnPAD	.024	.158	.691	.007

Tabel 9
Standardized indirect effects – Estimates

	LnBM	LnBBJ	LnBP	LnPE
LnBM	.000	.000	.000	.000
LnBBJ	.000	.000	.000	.000
LnBP	.000	.000	.000	.000
LnPE	.000	.000	.000	.000
LnPAD	.001	.003	-.006	.000

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap variabel pertumbuhan ekonomi adalah variabel belanja pegawai, yaitu sebesar -0,283 dan variabel yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap variabel penerimaan pendapatan daerah adalah variabel belanja pegawai, yaitu sebesar 0,691. Terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana ditunjukkan pada

tabel 9. Dari pengukuran tersebut, variabel yang memiliki pengaruh tidak langsung terbesar terhadap variabel penerimaan pendapatan asli daerah adalah variabel belanja pegawai, yaitu sebesar -0,006. Oleh karena adanya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel dalam model penelitian ini, maka perlu diukur pengaruh totalnya. Hasil pengukuran pengaruh total antar variabel sebagaimana ditunjukkan pada tabel 10.

Tabel 10
Standardized Total Effects – Estimates

	LnBM	LnBBJ	LnBP	LnPE
LnBM	.000	.000	.000	.000
LnBBJ	.000	.000	.000	.000
LnBP	.000	.000	.000	.000
LnPE	.015	.250	-.283	.000
LnPAD	.025	.161	.685	.007

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh total terbesar terhadap variabel pertumbuhan ekonomi adalah variabel belanja pegawai, yaitu sebesar -0,283 dan variabel yang memiliki pengaruh total terbesar terhadap variabel penerimaan pendapatan asli daerah adalah variabel belanja pegawai, yaitu sebesar 0,685.

Pengujian Hipotesis

Analisis regresi dalam model ini ditentukan dengan *critical ratio*-nya (C.R.) hipotesis akan diterima bila nilai C.R. lebih dari Nilai kritik sebesar 2,58 (*Hair dkk, 1998*) pada taraf signifikansi 1%. Gambaran lengkap hasil penghitungan tampak pada tabel 11.

Tabel 11
Hasil Uji Hipotesis

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Keterangan
LnPE	<--- LnBP	-0,150	0,025	-6,000	0,000	Ha tidak diterima
LnPE	<--- LnBBJ	0,153	0,029	5,304	0,000	Ha diterima
LnPE	<--- LnBM	0,009	0,028	0,323	0,746	Ha diterima
LnPAD	<--- LnBBJ	0,270	0,064	4,240	0,000	Ha diterima
LnPAD	<--- LnBP	1,025	0,056	18,374	0,000	Ha diterima
LnPAD	<--- LnBM	0,040	0,060	0,674	0,500	Ha diterima
LnPAD	<--- LnPE	0,021	0,109	0,189	0,850	Ha diterima

Hipotesis 1: Belanja Pegawai Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai C.R. untuk pengaruh antara belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -6,000 dengan Pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau $Pvalue (0,000) < \alpha (0,05)$. Belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Hipotesis 1 tidak dapat diterima.

Hipotesis 2: Belanja Barang dan Jasa Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai C.R. untuk pengaruh antara BBJ terhadap PE adalah sebesar 5,304 lebih besar dari nilai kritis 2,58 dengan Pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau $Pvalue (0,000) < \alpha (0,05)$. BBJ berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE. Dengan demikian Hipotesis 2 dapat diterima.

Hipotesis 3 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai C.R. untuk pengaruh antara Belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,323 dengan Pvalue sebesar 0,746 dimana lebih besar dari 0,05 atau $Pvalue (0,746) > \alpha (0,05)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal

berpengaruh positif tetapi pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Hipotesis 3 dapat diterima.

Hipotesis 4 : Belanja Modal berpengaruh Positif terhadap PAD Melalui PE

Nilai C.R. untuk pengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah adalah sebesar 0,674 dengan Pvalue sebesar 0,500 dimana lebih besar dari 0,05 atau $Pvalue (0,500) > \alpha (0,05)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian Hipotesis 4 diterima.

Hipotesis 5: Belanja Pegawai berpengaruh Positif terhadap PAD Melalui PE

Nilai C.R. untuk pengaruh antara belanja pegawai terhadap PAD melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 18,374 dengan Pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau $Pvalue (0,000) < \alpha (0,05)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD melalui pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Hipotesis 5 diterima.

Hipotesis 6: Belanja Barang dan Jasa berpengaruh Positif terhadap PAD melalui Pertumbuhan Ekonomi

Nilai estimasi untuk pengaruh antara secara tidak langsung belanja barang dan jasa terhadap PAD melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,240, dengan Pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau $Pvalue (0,000) < \alpha (0,05)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD melalui pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Hipotesis 6 diterima.

Hipotesis 7: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Positif terhadap PAD

Nilai estimasi untuk pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap PAD adalah sebesar 0,189, dengan Pvalue sebesar 0,850 dimana lebih besar dari 0,05 atau $Pvalue (0,850) > \alpha (0,05)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Dengan demikian Hipotesis 7 diterima.

ekonomi. Dengan demikian Hipotesis 4 diterima. Kelima, belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD melalui pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Hipotesis 5 diterima. Keenam, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD melalui pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Hipotesis 6 diterima. Terakhir, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Dengan demikian

Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan, yakni diantaranya: periode pengamatan merupakan periode yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, dalam hal ini adalah kondisi negara yang tidak stabil seperti ekonomi makro, kondisi politik, kebijakan pemerintah, tingkat inflasi, dan lain-lain yang juga berimbas pada kestabilan daerah. Oleh karenanya, saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menam-bahkan variabel bebasnya berupa variabel-variabel antara yang dapat mempengaruhi PAD, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih jelas melihat faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi PAD tersebut

PENUTUP

Dari hasil analisis yang dilakukan, maka penelitian ini menyimpulkan: pertama, belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Hipotesis 1 tidak dapat diterima. Kedua, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Hipotesis 2 dapat diterima. Ketiga, belanja modal berpengaruh positif tetapi pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Hipotesis 3 dapat diterima. Keempat, belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PAD melalui pertumbuhan

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/beta/kolom1.asp?kolom1=1100000>.
- Adi, P. H. 2007. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali), *Jurnal Akuntansi Dan Sektor Publik* 08 (01), 1450-1465, Februari 2007.

- Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah*, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Ghozali, I. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., dan S. Abdullah, 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Dan Bali*. Prociding Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Harianto, D., dan P. H. Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Prociding Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Irfan, R. S. *Analisis Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Tinjauan Pada Pemda Dengan Kemampuan Keuangan Rendah Se Jawa-Bali)*.
- Kuncoro, H. 2007. *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*, Prociding Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Lembaran Negara. 1999. *UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Lembaga Negara. 1999. *UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Lembaga Negara. 2004. *UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Lembaga Negara. 2004. *UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Lembaga Negara. 2007. *Permendagri No. 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.html
- Setiaji, W., dan P. H. Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)*. Prociding Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Sidik, M. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya Di Indonesia)*, Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia, Jogjakarta 13 Maret 2002.

Sidik, M. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Dlam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, www.sikd.djapkd.go.id.

Susilo, G. T. B., dan P. H. Adi. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan APBD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris Propinsi Jateng)*, Prosiding Konferensi Akuntansi Dan Sektor Publik Pertama, Surabaya.

www.bmkg.go.id